



Quick Response Analysis

Volume 8, Mei 2020

INDUSTRI INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID-19¹

Sektor industri Indonesia terkena dampak sangat signifikan dari adanya pandemi COVID-19. Diperkirakan lebih dari 5 juta pekerja industri (28 persen dari total pekerja industri), saat ini dalam status tidak bekerja. Para pekerja tersebut merupakan tenaga kerja yang tersebar di berbagai jenis industri baik kecil maupun besar. Selain itu, *lockdown* yang dilakukan di berbagai negara telah membuat beberapa industri yang berorientasi di bidang ekspor seperti furnitur dan tekstil, mengalami penurunan.

Sektor industri memberikan kontribusi terhadap kurang lebih 20 persen dari PDB nasional. Sehingga Pukulan keras kepada sektor industri akan berdampak langsung pada perekonomian nasional. Oleh karena itu pemerintah melakukan antisipasi, dengan mengeluarkan stimulus ekonomi yang meringankan beban biaya perusahaan dan mendorong daya beli golongan pekerja. Berkaca kepada industri pengolahan, yang masih bertahan ditengah pandemi ini, stimulus ekonomi tersebut perlu memperhatikan dua hal, yaitu menguatkan industri yang masih tumbuh positif, dan menyiapkan sektor industri dalam menghadapi tatanan normal baru atau "*new normal*".

Menguatkan Industri yang Masih Tumbuh Positif

Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap beberapa sektor yang masih tumbuh positif dan menjadi penopang pertumbuhan industri pengolahan, seperti makanan dan minuman, kimia, farmasi, obat-obatan, dan sejenisnya. Ini dilakukan agar industri tersebut tetap dapat beroperasi, tanpa perlu mengurangi tenaga kerjanya. Hal tersebut diharapkan akan dapat memperlambat laju pengangguran. Di samping itu dapat meringankan beban Pemerintah dalam menjamin ketersediaan bantuan sosial untuk masyarakat.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan Pemerintah untuk memastikan operasi industri tetap berjalan adalah dengan penundaan tagihan kewajiban kepada perusahaan dengan tanpa denda. Hal ini bisa diterapkan untuk tagihan pembayaran listrik dan air, serta kewajiban lain, seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran kewajiban ini dapat dilakukan oleh perusahaan pada periode berikutnya, ketika ekonomi mulai membaik dengan diberikan secara *spreadoff* selama beberapa bulan atau periode waktu tertentu. Hal yang terpenting bagi Pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat tetap memiliki pekerjaan dan mencegah adanya tambahan pekerja yang mengalami PHK. Di sisi lain, Pemerintah perlu untuk memastikan perusahaan tetap beroperasi dengan meringankan beban biaya mereka.

¹ Tulisan ini disarikan dari Seminar Daring KSIxChange dengan pemateri Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, *Vice President* PT. *Pan Brother*, Tbk. dan *Direktur* Ribka *Furniture*.

Pemerintah juga dapat menurunkan bunga pinjaman bagi perusahaan disertai dengan tenggat waktu jatuh tempo yang lebih lama, dan penundaan penagihan kredit dengan cicilan bunga yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan pada saat pandemi COVID-19.

Jika perusahaan harus mengurangi jumlah pekerjanya, Pemerintah perlu memastikan status pekerja tersebut sebagai pekerja yang dirumahkan, baik mendapat gaji atau tidak. Hal ini guna mengurangi beban pekerja tersebut di masa mendatang untuk mencari pekerjaan yang baru ketika keadaan ekonomi sudah membaik.

Memastikan Kesiapan Sektor Industri terhadap “New Normal”

Dengan era “*new normal*” yang akan segera dihadapi, mekanisme dan cara kerja sektor industri pun perlu disesuaikan. Mekanisme yang dapat diberikan kepada perusahaan adalah pemberlakuan sistem *shift* dalam pekerjaan, disertai dengan penyesuaian gaji dengan jam kerja atau *output* produksi yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk memastikan kegiatan operasional tetap berjalan. Cara kerja pun harus dapat memenuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker dan menjaga kebersihan tangan. Kampanye dan edukasi menghadapi COVID-19 dan “*new normal*” serta menjaga pola hidup bersih dan sehat pun perlu lebih serius digalakkan di sektor industri.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan pihak swasta secara lebih intens dalam penyediaan alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam menangani penyebaran dan pengobatan Covid-19, baik APD, masker, obat-obatan, hingga *ventilator*. Kerja sama ini juga dapat menguatkan jaringan hulu ke hilir dari perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk UMKM dan unit usaha di bawahnya. Pihak-pihak yang menyediakan kebutuhan tersebut dapat diberikan insentif produksi sehingga memungkinkan tersedianya alat-alat tersebut dalam jumlah massal dengan biaya yang lebih murah.

Dengan adanya pembukaan *lockdown* di beberapa negara², pemerintah perlu memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor untuk dapat beroperasi kembali sesuai dengan target negara yang dituju. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan mekanisme kerja “*new normal*”.

Dengan adanya pergeseran pola kerja di dunia usaha, Pemerintah perlu melakukan investasi yang lebih besar untuk teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadi hal yang sama di masa mendatang. Dari sisi pemerintah, hal ini dapat menjadi landasan Pemerintah untuk semakin menerapkan *e-government* dan bentuk adaptasi terhadap digitalisasi yang semakin banyak dilakukan. Penerapan digitalisasi ini tentu saja juga harus diikuti oleh instansi pemeriksa akuntabilitas penggunaan anggaran, dengan tidak lagi menjadikan dokumen-dokumen fisik sebagai satu-satunya alat bukti pemakaian anggaran yang valid.

===

Penulis: Jabbar Hidayatullah
Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas
Email: jabbar.hidayat@support.bappenas.go.id

² Paparan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Mei 2020. Indonesia's *Economic Recovery from COVID-19*.